



Media: BERNAS

Hari: Jumat

Tanggal: 06 Maret 2009

Halaman: 1

Walikota Jogja, Herry Zudianto:

Saya Akui Pemkot Belum Bersih dari Korupsi



Herry Zudianto

DOK

WALIKOTA DIY Herry Zudianto mengatakan akan secara bertahap dan perlahan memberantas korupsi. Karena jika dipaksakan justru hasilnya akan kurang baik.

Demikian dikatakan dalam *Policy Corner Mengapa Yogyakarta Menjadi Kota Terbersih dari Korupsi?* di Gedung Magister Studi Kebijakan UGM, Kamis (5/3).

Hal tersebut ia utarakan karena ia mengakui birokrasi pemerintahan Kotamadya belum benar-benar bersih dari korupsi, meski Kota Yogyakarta sempat mendapat predikat sebagai kota terbersih dari korupsi oleh Lembaga Transparency International

Indonesia (TII).

"Dengan kata lain terbersih dari korupsi tapi secara umum faktanya masih ada korupsi," ujarnya. Berdasarkan rapot dari TII, Kota Jogja menempati ranking pertama dengan poin 6,43 sebagai kota terbersih dari korupsi dari 50 kota di Indonesia yang disurvei. Angka itu menurut Herry belum cukup membanggakan dan menjadi pekerjaan rumah walikota untuk meningkatkannya. Karenanya, ia akan mengupayakan beberapa hal untuk meningkatkan angka tersebut salah satunya dengan membuka layanan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan Masyarakat (UPIK).

Unit ini memungkinkan masyarakat bisa secara langsung melaporkan perilaku menyimpang pegawai pemkot. Bisa dikatakan UPIK merupakan salah satu langkah evolutif yang bisa membawa semua pegawai menuju kesadaran dan kemauan untuk membuat diri sendiri lebih bersih dan lebih baik.

"Saya hanya bisa membujuk dan mengajak pegawai-pegawai yang ada di bawah menjadikan Kota Jogja makin bersih dari korupsi. Peran saya hanya 30 persen, sedangkan 70 persennya ada di tangan para kepala dinas," tutur Herry.

>> KE HAL 10

Saya Akui Pemkot Belum Bersih

Sambungan dari halaman 1

Sementara itu Manajer Riset dan Kebijakan Lembaga TII Frenky Simanjuntak mengungkapkan, walau Jogja menjadi kota terbersih dari korupsi, kota ini belum terlalu baik dan benar-

benar bersih. "Kami pernah meneliti perilaku pegawai pemerintahan daerah Jogja, ternyata hasilnya tindak korupsi di Pemda DIY masih tergolong tinggi, poinnya mungkin hanya 4,4," jelasnya.

(c8)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Mei 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005